

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN TINDAK
PIDANA PEMALSUAN STNK
(Studi Kasus Putusan No. 1745/Pid.Sus/2016/PN.MKS)



OLEH
NARA REBRISAT
B 111 13 392

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN STNK
(Studi Kasus Putusan No. 1745/Pid.Sus/2016/PN.Mks)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

**NARA REBRISAT
B 111 13 392**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN STNK (Studi Kasus Putusan No.
1745/Pid.Sus/2016/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh:

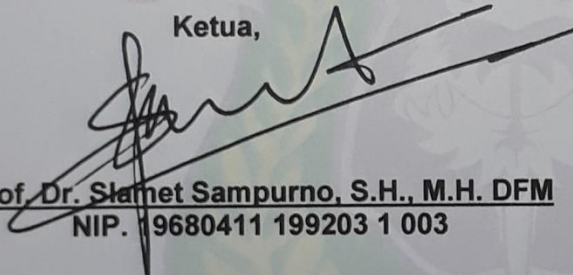
NARA REBRISAT

B111 13 392

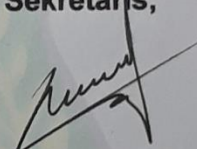
Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 31 Mei 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H. DFM
NIP. 19680411 199203 1 003

Sekretaris,


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan**


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : NARA REBRISAT

NIM : B 111 13 392


Bagian : HUKUM PIDANA

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Pembantuan Tindak Pidana Pemalsuan STNK (Studi Kasus Putusan No. 1745/Pid.Sus/2016/PN.MKS).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Mei 2017

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM
NIP : 19660411 199203 1 003

PEMBIMBING II



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP : 19800710 200604 1 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NARA REBRISAT
Nomor Pokok	: B11113392
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap pembantuan Tindak Pidana Pemalsuan STNK (Studi Kasus Putusan No.1745/Pid.Sus/2016/PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Nara Rebrisat (B11113392), “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan Tindak Pidana Pemalsuan STNK (Sudi Kasus Putusan No. 1745/Pid.Sus/2016/PN.MKS) dibimbing oleh Bapak Slamet Sampurno selaku Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam perkara putusan nomor 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam putusan nomor 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS.

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar. Dengan berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung dengan hakim, maupun mempelajari data yang diperoleh melalui penelitian normatif yakni penelusuran berkas/dokumen, buku serta hasil membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) penerapan hukum pidana terhadap pelaku pembantuan pemalsuan surat dalam putusan Nomor : 1745/Pid.Sus/2016/PN.MKS, dimana pelaku didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 266 ayat (1) KUHP; atau Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; atau Ketiga : Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut pelaku bersalah atas dakwaan ketiga yakni Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut. dan Majelis Hakim dengan yakin menerapkan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP untuk memidana pelaku. Sehingga penerapan hukum pidana dalam perkara ini telah sesuai dan tepat. 2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara ini telah sesuai, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan seperti keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, petunjuk-petunjuk hingga pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang membentuk keyakinan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, penyertaan, pertolongan, dan kasihNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai tugas akhir dari rangkaian proses pendidikan yang Penulis jalani untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berkat adanya doa, pemikiran, tenaga dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena rampungnya karya tulis ini, Penulis dengan segala hormatnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Victor Yohan dan Ibunda Siska Daniel semoga Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, kekuatan, berkat, sukacita kepada beliau, atas segala jasa-jasa yang telah diberikan kepada Penulis. Serta tidak lupa pula, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada saudara Penulis yakni Natasha Sasti Putri yang juga memotivasi dalam perjalanan pendidikan penulis selama ini.

Banyak pihak yang mempunyai peranan penting dalam membantu Penulis dalam penyelesaian skripsi ini sekaligus sebagai tanda telah diselesaikannya pendidikan Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariest Tina Pulubuhu M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H., dan Bapak Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, SH., MS. selaku ketua Departemen Hukum Pidana dan Bapak Dr. Amir Ilyas, SH., MH. selaku sekretaris Departemen Hukum Pidana.
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno S.H., M.H., DFM selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Amir Ilyas S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan pengertian membimbing Penulis mulai dari tahapan awal hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abd. Asis S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H., M.H., dan Ibu Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H., selaku dosen Penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan koreksi mulai dari awal hingga selesainya skripsi ini.
7. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan selama Penulis masih duduk di bangku Perkuliahan.

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik serta bantuan yang lainnya.
10. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Hakim beserta Pegawai dari Pengadilan Negeri Makassar atas izin, bantuan dan kerjasamanya sehingga Penulis dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Bogarz alias HutanKotasq (Yuliani Syafriyanti, Novita Indriyanti Budiman, Karina Eka W. Astari, Dianita Lestari, Caecilia S. Birana, Faradiba Purnamasari, Edna Cynthia, Sarce Esan atau Gadis Esan, dan Riyada Layana) yang senantiasa memberikan dukungan, doa, berbagi suka dan duka mulai dari masa-masa semester awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian pendidikan ini.
12. Saudara-saudaraku Wanita-wanita Khayangan (Sarce Esan dan Riyada Layana) terima kasih karena telah memberikan semangat, dan keceriaan kepada Penulis.

13. Sahabat-sahabatku TEXTHER SMA Katolik Cenderawasih yang juga turut memberikan doa, dukungan, dan semangatnya dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Keluarga KKN Tematik Makassar Gelombang 93 secara khusus Posko Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, serta Ibu Lurah Butung beserta staf dan jajaran yang sudah mau menerima dan merawat kami, terima kasih atas waktu yang singkat dimana kita bisa saling mengenal, bekerja sama, dan berbagi semua pengalaman yang telah terjadi selama masa KKN.
15. Bapak dan Ibu Pendeta serta Jemaat Gereja KIBAID Jemaat Perumnas yang telah memberikan dukungan-dukungan doa kepada Penulis.
16. Teman-teman PKM Gereja KIBAID Jemaat Perumnas yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada Penulis.
17. Teman-teman Yuniklof (Zara/Wiwi, Asmi, Cua, Nina, dan Ummu) yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan, dan semangat yang tidak henti-hentinya kepada Penulis.
18. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan secara khusus kepada rekan-rekan Mahasiswa(i) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2013 (ASAS 2013) yang menemani Penulis berjuang bersama dari awal hingga masa penyelesaian studi ini. Terima kasih atas kebersamaan, ilmu, informasi, yang sudah

diberikan kepada Penulis khususnya pada tahap penyelesaian skripsi ini.

19. Kepada semua pihak yang berkenan memberi bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Atas segala bantuan, kerja sama yang telah diberikan dengan ikhlas kepada Penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi Penulis.

Penulis menyadari apa yang terdapat di dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan menjadi bahan masukan bagi Penulis agar kedepannya skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi, dan besar harapan Penulis semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana. Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada kita semua, Amin.

Makassar, Mei 2017

Nara Rebrisat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	17
B. Penyertaan.....	21
1. Pengertian Penyertaan	21
2. Bentuk Penyertaan.....	23
1. Pembuat Pelaksana (<i>Pleger</i>).....	23
2. Pembuat Penyuruh (<i>Doen Pleger</i>).....	23

3. Pembuat Peserta (<i>Medepleger</i>)	24
4. Pembuat Penganjur (<i>Uitlokker</i>).....	25
5. Pembantuan (<i>Medeplichtige</i>).....	26
C. Pemalsuan Surat.....	30
1. Pengertian Pemalsuan Surat	30
2. Bentuk Pemalsuan Surat	31
1. Membuat Surat Palsu atau Memalsu Surat	31
2. Memakai Surat Palsu atau Surat yang Dipalsu	33
D. Pidana dan Pemidanaan	36
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	36
2. Teori-teori Pemidanaan.....	37
3. Jenis-jenis Pidana	40
E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menatuhkan Pidana	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Lokasi Penelitian	44
B. Jenis dan Sumber Data	44
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam perkara putusan nomor 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS.	47
1. Posisi Kasus.....	47
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	48
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	52
4. Amar Putusan	53
5. Analisis Penulis	53

B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam putusan nomor 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS	59
1. Pertimbangan Hakim.....	59
2. Analisis Penulis	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup bermasyarakat manusia terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial. Aspek fisik merujuk pada hakikat manusia sebagai makhluk yang secara ragawi benar-benar hidup. Sedangkan aspek eksistensial berkaitan dengan keberadaannya yang berbeda dengan makhluk hidup lain. Sebagai makhluk hidup secara fisik, untuk mempertahankan kehidupannya, manusia butuh makan, minum, melindungi diri, serta berkembang biak. Akan tetapi untuk mempertahankan eksistensinya manusia tidak hanya membutuhkan sarana-sarana fisik semacam itu, namun manusia juga membutuhkan cinta kasih. Mengasihi merupakan bentuk eksistensi dalam suatu kerangka yang lain daripada sekedar bertahan hidup secara fisik.

Keamanan secara fisik dan keamanan secara eksistensi merupakan dua hal yang berbeda. Pada keamanan secara fisik ada gangguan berupa kelaparan, penyakit, pembunuhan, kekerasan, dan lain-lain. Pada keamanan secara eksistensi, terdapat gangguan berupa rasa takut, diasingkan, dicemooh, dan lain-lain. Oleh karena itulah dalam mengatasi gangguan itupun berbeda. Dalam mengatasi gangguan terhadap keamanan secara

fisik, dibutuhkan makan, obat-obatan, dan tubuh yang kuat untuk dapat bertahan menghadapi lawan. Sedangkan untuk mengatasi gangguan keamanan secara eksistensi, karena mengingat kodratnya sebagai makhluk sosial sehingga untuk dapat melangsungkan hidup dan eksistensinya, manusia mengembangkan sarana yang bersifat immaterial yang dapat menjadi perekat dalam hidup bermasyarakat. Sarana itu terpancar dari dalam diri manusia itu sendiri, yaitu cinta kasih, sikap kebersamaan atau apapun namanya yang menunjuk kepada adanya agregasi yang bersifat asosiatif-kooperatif, dan keinginan untuk tetap dapat melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Rasa cinta kasih dan kebersamaan yang ada di dalam diri setiap manusia inilah yang menggerakkan akal pikiran manusia untuk menciptakan pranata-pranata dalam kehidupan bermasyarakat. Rasa cinta kasih dan kebersamaan itulah yang disebut dengan moral. Dengan demikian pranata-pranata itu timbul karena adanya moral pada makhluk yang disebut manusia.

Dilihat dari segi tujuannya, pranata-pranata itu dapat berbentuk ritual dan norma. Dimana ritual sebagai pranata yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dengan sesuatu diluar dirinya. Sedangkan norma sebagai petunjuk hidup, yakni petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku di dalam

masyarakat.¹ Norma berisi perintah dan larangan. Perintah dan larangan yang masih bersifat luas itu dituangkan kedalam aturan-aturan yang bersifat konkret. Aturan-aturan tersebut membatasi individu dalam berpolah tingkah pekerti guna mempertahankan kehidupan bermasyarakat terlepas dari apakah aturan-aturan tersebut secara konkret baik secara tertulis atau melalui kebiasaan-kebiasaan hidup bermasyarakat. Aturan-aturan semacam itu tentu saja telah disepakati dan dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan. Aturan-aturan inilah yang disebut sebagai hukum.

Akibat dari semakin maju dan berkembangnya zaman, secara tidak langsung menimbulkan berbagai hal dalam kehidupan. Mulai dari hal positif yang merupakan sesuatu yang baik dan tidak akan menghambat kehidupan, serta hal negatif yaitu sesuatu yang buruk yakni masalah yang harus sesegera mungkin untuk diselesaikan yang apabila tidak, akan menimbulkan berbagai fenomena seperti kejahatan atau masalah-masalah hukum yang tentunya akan menghambat kehidupan bermasyarakat.²

Seiring dengan perkembangan zaman, fenomena masalah hukum juga ikut meningkat dan menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan meningkatnya fenomena masalah hukum ini maka meningkat pula kajian-kajian yuridis yang bertujuan untuk menemukan solusi hukum atas

¹ Yulies Tiena Masriani. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta, hlm.1.

² Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana : Jakarta, hlm. 42-43.

fenomena-fenomena tersebut dengan menggunakan dasar-dasar, teori-teori hukum, serta peraturan perundang-undangan untuk mengkaji fenomena masalah-masalah hukum ini. Salah satu masalah hukum yang sudah sangat banyak dikaji secara yuridis adalah tindak pidana. Adapun tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang tindakannya tersebut telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat melihat kedudukan hukum sebagai sebagai suatu alat pengawas atau pembatas.

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai alat pengawas atau pembatas guna terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak menjalankan negara hanya semata-mata berdasarkan kekuasaan. Penegasan tersebut bertujuan agar setiap warga negara Indonesia menjadi warga yang sadar dan taat hukum serta demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bersamaan dengan lahirnya hukum maka bisa dipastikan akan timbul pula pertentangan-pertentangan yang dikenal dengan pelanggaran hukum. Dengan kata lain, suatu kejahatan lahir atau berawal dari adanya peraturan atau hukum. Ketika hukum menjadi hal yang amat penting maka diperlukan adanya aparat penegak hukum yang bertanggung jawab akan hal penegakan hukum sehingga tercipta apa yang disebut dengan stabilitas hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman dunia. Dimana perkembangan tersebut sudah merambah berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan-perkembangan tersebut tidak hanya membawa pengaruh pada negara, namun telah mempengaruhi mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, hingga menyebabkan pergeseran budaya yang amat signifikan dalam masyarakat. Khususnya pada masa setelah reformasi yang memperburuk keadaan bangsa, tidak hanya memperburuk aspek ekonomi namun juga memperburuk aspek moral masyarakat yang mendorong terjadinya tindak kejahatan.

Dalam beberapa tahun terakhir pun pelanggaran atau tindak kejahatan yang terjadi dimasyarakat semakin meningkat, dan tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Berbagai faktor penyebab meningkatnya tindak kejahatan di masyarakat mulai dari himpitan ekonomi hingga alasan sakit hati atau dendam. Pelaku tindak kejahatan pun beragam mulai dari orang biasa hingga aparat penegak hukum menjadi aktor utama suatu tindak kejahatan. Salah satu tindak kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan.

Tindak pidana pemalsuan umumnya berbentuk pemalsuan terhadap uang, surat, tandatangan, merk benda, hingga identitas. Dewasa ini keberadaan surat, uang, atau merk benda tertentu sangat diperlukan untuk menunjang dan memudahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Melihat pentingnya keberadaan surat di dalam kehidupan bermasyarakat mendorong oknum-oknum tidak bertanggungjawab melakukan pemalsuan surat untuk mencari keuntungan. Definisi pemalsuan surat sendiri tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggunaan surat palsu, sedangkan jenis dari surat itu sendiri diatur dalam pasal 264 KUHP.

Dewasa ini tindak pidana pemalsuan surat yang sering terjadi adalah pemalsuan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baik kendaraan motor atau mobil. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ini dikategorikan kedalam surat karena merupakan suatu alat bukti yang dibuat dan diterbitkan

oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak Satuan Lalu Lintas Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa keberadaan STNK sangatlah penting dimana hal tersebut berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor, dan untuk mendapatkan STNK itu maka pemilik kendaraan bermotor perlu mengikuti prosedur-prosedur yang benar yang sudah ditetapkan oleh Satuan Lalu Lintas Republik Indonesia untuk mendapatkan STNK tersebut, namun karena alasan rumit sehingga para pemilik kendaraan bermotor merasa enggan untuk mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan tersebut. melihat peluang tersebut mendorong oknum-oknum tidak bertanggungjawab mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.

Kerap kali di dalam suatu peristiwa pidana pelaku tindak pidana tidak bekerja sendiri namun dibantu oleh pihak-pihak lain yang baik secara sengaja maupun tidak, memberi bantuan pada saat terjadinya tindak pidana. Hal yang sama juga sering terjadi dalam tindak pidana pemalsuan baik dalam tindak pidana pemalsuan uang, hingga tindak pidana pemalsuan surat seperti STNK. Untuk mempermudah dalam praktik tindak pidana pemalsuan ini dan untuk mendapatkan hasil yang baik yang serupa dengan aslinya, maka diperlukan keahlian khusus, sehingga dalam tindak pidana pemalsuan, pelaku tidak bekerja seorang diri namun dibantu oleh pihak-pihak lain sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keinginan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai Pembantuan Tindak Pidana Pemalsuan STNK,

sehingga penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Pembantuan Tindak Pidana Pemalsuan STNK (Studi Kasus Putusan No. 1745/Pid.Sus/2016/PN.MKS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam perkara putusan nomor 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam putusan nomor 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam perkara putusan nomor 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam perkara nomor 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kiranya melalui hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
2. Kiranya melalui hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pembangunan di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang kita kenal saat ini dalam sistem perundang-undangan di Indonesia merupakan terjemahan yang diambil dari hukum pidana Belanda yakni *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* ini apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dalam berbagai istilah seperti istilah delik yang terdapat dalam kepustakaan hukum pidana, serta istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana yang sering digunakan oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang.

Penggunaan istilah *strafbaar feit* sendiri oleh para pakar Hukum Pidana Indonesia pun berbeda-beda, seperti :

- a. Istilah perbuatan pidana yang digunakan oleh **Moeljatno**. **Moeljatno** menggunakan istilah perbuatan pidana karena yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya. Antara larangan (yang ditujukan kepada perbuatannya)

dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. Dan untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana.³

- b. Istilah delik yang digunakan oleh **Zainal Abidin Farid** dan **Satochid Karta Negara**. Menurut **Zainal Abidin Farid** istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan istilah *Starfbaar feit* adalah istilah delik yang berasal dari bahasa latin “delictum delicta” karena :

1. Bersifat universal, semua orang di dunia mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti istilah “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya); dan
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi.⁴

- c. Istilah tindak pidana yang digunakan oleh **Wirjono Projodikoro**, **Soesilo**, dan **S.R. Sianturi**. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah khususnya Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam

³ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, hlm. 71.

⁴ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, hlm. 23-24.

undang-undang tindak pidana khusus seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi. Sudarto berpendapat bahwa pemakaian istilah tindak pidana sudah tepat, dan lebih condong ikut menggunakan istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto ini diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami masyarakat.⁵

- d. Istilah peristiwa pidana yang digunakan oleh beberapa ahli seperti **R. Tresna** dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, **H.J. van Schravendijk** dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia.
- e. Istilah pelanggaran pidana yang digunakan oleh **M.H. Tirtaamidjaja** dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana.
- f. Istilah perbuatan yang boleh dihukum yang digunakan oleh **Karni** dalam bukunya Ringkasan tentang Hukum Pidana.

Sependapat dengan para pakar hukum Indonesia di atas, para pakar asing Hukum Pidana dalam menggunakan istilah *strafbaar feit* juga berbeda-beda seperti istilah *strafbare handlung* yang oleh pakar Hukum

⁵ Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, hlm. 49-51.

Pidana Jerman yang dapat diartikan sebagai perbuatan pidana, serta istilah *criminal act* yang diterjemahkan menjadi istilah perbuatan kriminal.

Istilah tindak pidana, perbuatan pidana, ataupun delik yang dalam bahasa aslinya yakni bahasa Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit*, terdiri atas tiga unsur kata yakni kata *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* yang diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, serta kata *feit* yang diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Berdasarkan uraian sebelumnya maka istilah *strafbaar feit* apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat ditarik suatu pengertian yaitu sebagai suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Andi Hamzah yang menggunakan istilah delik untuk menerjemahkan istilah *strafbaar feit* memberikan definisi mengenai delik sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁶

Van Hamel berpendapat bahwa delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.⁷

Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸

⁶ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 19.

⁷ Laden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 8.

⁸ Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidada Indonesia : Suatu Pengantar*. PT. Refika aditama : Bandung, hlm. 98.

Pompe merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁹

Vos menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰

Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana berpendapat, bahwa perbuatan pidana sebagai perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹²

Setelah melihat berbagai pendapat ahli atas istilah *strafbaar feit* maka penulis berkesimpulan yang dimaksud dengan *strafbaar feit* atau yang kita kenal saat ini dalam sistem perundang-undangan Indonesia dengan istilah tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan norma-norma hukum dimana perbuatan-perbuatan tersebut diatur dan dilarang oleh undang-undang dan perbuatan-perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Terlepas dari penggunaan istilah *strafbaar feit* yang berbeda-beda sebenarnya memiliki makna dan tujuan yang sama yakni untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana maka terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 72

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 71.

¹² *Ibid.*, hlm. 75.

a. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang yakni bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan yang ada. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang terdiri dari dua unsur, antara lain :

1. Unsur subjektif, adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Unsur melawan hukum;
- 2) Unsur kesalahan.

2. Unsur objektif, adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku, yaitu semua unsur mengenai perbuatan, akibat perbuatan, dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Unsur objektif terdiri atas :

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur akibat konstitutif;
- 3) Unsur keadaan yang menyertai;
- 4) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 5) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 6) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 7) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

- b. Unsur tindak pidana dari sudut teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli, antara lain :

Menurut **Moeljatno**, unsur-unsur tindak pidana antara lain :¹³

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana

Menurut **R. Tresna** unsur-unsur tindak pidana terdiri atas :¹⁴

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut **Vos**, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas :¹⁵

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut **Jonkers**, unsur-unsur suatu tindak pidana terdiri atas :¹⁶

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara menurut **Schravendijk** unsur-unsur tindak pidana terdiri atas :¹⁷

¹³ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 80.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 81.

¹⁷ *Ibid.*

- a. Kelakuan;
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang;
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar-dasar tertentu, antara lain :

1. Kejahatan dan Pelanggaran.

Tindak pidana berdasarkan sistem KUHP yang dianut bangsa Indonesia diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Pengelompokan ini dilakukan atas dasar jenis pelanggaran yang lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui melalui ancaman pidana pada pelanggaran yang lebih ringan apabila dibandingkan dengan ancaman pidana kejahatan. Kriteria lain yang membedakan antara pelanggaran dan kejahatan yakni kejahatan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan *in abstracto* saja.

Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T.) pembagian tindak pidana ke dalam dua kelompok ini didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rectsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang,

sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.¹⁸

2. Delik Formal (Formil) dan Delik Materil (Materiil).

Berdasarkan cara merumuskannya delik terbagi atas dua yaitu delik formil dan delik materil. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain dalam perumusan delik formil tidak memerlukan akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, karena akibat dari suatu perbuatan disini hanya merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan). Sementara delik materil adalah delik menitik beratkan pada akibat yang dilarang dari suatu perbuatan, sedangkan bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Delik Dolus dan Delik Culpa.

Berdasarkan bentuk kesalahannya dibagi atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus (sengaja) adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata

¹⁸ Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta : Jakarta, hlm. 78.

yang tegas seperti “dengan sengaja”, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada seperti “diketahuinya” dan sebagainya. Sedangkan delik culpa (tidak dengan sengaja) adalah delik yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan seperti kata “karena kealpaannya”, dan dalam beberapa terjemahan lain digunakan istilah “karena kesalahannya”.¹⁹

4. Delik Commissionis (Tindak Pidana Aktif) dan Delik Omissionis (Tindak Pidana Pasif).

Berdasarkan macam perbuatannya terbagi atas delik commissionis dan delik omissionis. Delik commissionis atau tindak pidana aktif adalah delik yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sedangkan delik omissionis atau tindak pidana pasif adalah suatu delik atau tindak pidana dimana ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang membuat seseorangdibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 59.

kewajiban hukumnya tadi. Disini ia telah melakukan tindak pidana pasif karena telah mengabaikan suatu kewajiban hukum.²⁰

5. Delik Aduan dan Delik Biasa

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan delik dibagi atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Sedangkan delik biasa adalah delik yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Masih banyak lagi mengenai jenis-jenis delik tergantung darimana kita meninjau delik tersebut, misalnya delik berkualifikasi yaitu tindak pidana dengan pemberatan, contohnya pencurian di malam hari, sampai penganiayaan berat. Delik dengan privilege, yaitu delik dengan peringanan, contohnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui. Hingga delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti ibu, ayah, pegawai negeri, hakim, dan sebagainya yang disebutkan dalam KUHP.

²⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 129.

B. Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Istilah penyertaan atau *deelneming* diadopsi dari kata *deelnemen* (bahasa Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* yang diartikan menjadi penyertaan. Menurut **Adami Chazawi** penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²¹

Didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dasar hukum mengenai penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang berbunyi :

Pasal 55 berbunyi :

- (1) *Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu :*
 1. *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan.*
 2. *Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman, atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.*
- (2) *Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.*

²¹ Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana : Percobaan dan Penyertaan*. 2011. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, hlm. 73.

Pasal 56 Berbunyi :

- (1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
- (2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP diatas, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

1. Yang pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka :
 - a. Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
 - b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut pembuat penyuruh (*doen pleger*);
 - c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
 - d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
2. Yang kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi :
 - a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

2. Bentuk Penyertaan

Sesuai dengan uraian sebelumnya maka bentuk-bentuk penyertaan terdiri atas :

1. Pembuat Pelaksana (*Pleger*)

Pembuat pelaksana atau mereka yang melakukan adalah orang yang karena perbuatannya melahirkan suatu tindak pidana, sehingga tanpa adanya perbuatan pembuat pelaksana, suatu tindak pidana tidak akan terwujud. Agar seseorang dapat dikategorikan sebagai pembuat pelaksana (*pleger*) maka dibutuhkan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya dengan seorang penganjur; atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu.

Dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil pembuat pelaksananya ialah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan yang dilarang yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan dalam tindak pidana materiil, pembuat pelaksananya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

2. Pembuat Penyuruh (*Doen Pleger*)

Dalam M.v.T dinyatakan bahwa pembuat penyuruh atau mereka yang mereka yang menyuruh melakukan merupakan orang yang juga melakukan tindak pidana namun tidak secara langsung dalam hal ini

sering disebut sebagai *manus domina* dan dalam doktrin disebut dengan *middelijke dader* (pembuat tidak langsung), melainkan dengan perantaraan orang lain dalam tangannya yang sering disebut dengan *manus minestra*, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan, atau tunduk pada kekerasan.²² Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut **Wirjono Prodjodikoro** berpendapat bahwa orang yang disuruh (*manus minestra*) tidak dapat dipidana karena hanya menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh orang yang menyuruh (*manus domina*).²³

3. Pembuat Peserta (*Medepleger*)

Yang dimaksud dengan pembuat peserta atau mereka yang turut serta melakukan oleh M.v.T adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. dalam pandangan sempit turut serta dapat terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan dalam pandangan luas turut serta tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak

²² *Ibid.*, hlm. 88.

²³ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Aditama: Bandung, hlm. 118.

pidana, namun antara kesengajaan pembuat peserta dan pembuat pelaksana harus sama.

4. Pembuat Penganjur (*Uitlokker*)

Pembuat penganjur atau orang yang sengaja menganjurkan merupakan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Maka dari rumusan tersebut **Adami Chazawi** dalam bukunya merumuskan syarat-syarat dari seorang pembuat penganjur, antara lain :²⁴

- a. Kesengajaan pembuat penganjur harus ditujukan pada 4 hal :
 - 1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya pengancuran;
 - 2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;
 - 3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan);
 - 4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
- b. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP.
- c. Terbentuknya atau terwujudnya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya pengancuran oleh si pembuat penganjur.
- d. Orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.
- e. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

²⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 113.

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembantuan, maka terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain unsur subjektif yaitu kesengajaan pembuat pembantu dalam dia mewujudkan perbuatan bantuannya (baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan kejahatan) ditujukan perihal untuk mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (pembuat pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan. Unsur yang kedua yakni unsur objektif bahwa wujud dari perbuatan (bantuan) yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Sehingga dari wujud perbuatan pembuat pembantu itu, tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pelaksananya.²⁵

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (pasal 56 KUHP), maka bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara lain :

- a. Pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan; dan
- b. Pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 143-145

Yang mana menurut M.v.T. hanya pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan (pembantu jenis kedua dalam pasal 56 ayat (2) KUHP) oleh undang-undang diberikan batasan-batasan mengenai cara melakukannya, yakni :²⁶

1. Dengan memberikan kesempatan, yaitu memberikan peluang yang sebaik-baiknya dalam hal orang lain untuk melakukan kejahatan;
2. Dengan memberikan sarana, yaitu memberikan suatu alat atau benda yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan;
3. Dengan memberikan keterangan, yaitu menyampaikan ucapan-ucapan dalam susunan kalimat yang dimengerti oleh orang lain, berupa nasihat atau petunjuk dalam hal orang lain melaksanakan kejahatan.

Perihal pertanggungjawaban pidana bagi pembantuan sendiri dimuat dalam pasal 57 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

1. *Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.*

²⁶ A. Z. Abidin dan A. Hamzah. 2006. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. PT RajaGrafindo : Jakarta, hlm. 224.

2. *Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.*
3. *Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.*
4. *Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya.*

Oleh sebab itu untuk memahami dan membedakan pasal 56 KUHP tentang pembantuan dengan bentuk-bentuk penyertaannya yang lain, dapat kita perhatikan melalui pasal 57 KUHP ayat (4) diatas dimana dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pembantu itu terbatas atau dibatasi, yakni hanya pada wujud perbuatan apa yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya saja. Akan tetapi di lain pihak, tanggung jawab pembuat pembantu dapat diperluas tergantung pada akibat yang ditimbulkan berupa keadaan-keadaan objektif yang memberatkan yang timbul setelah diwujudkannya perbuatan (kejahatan) yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya. Artinya bahwa pembuat pembantu itu adalah *accessoire* (bergantung) pada apa yang diperbuat oleh pelaksananya sehingga tanggung jawab pembuat pembantu tidak mungkin menyimpang atau melebihi apa yang telah diperbuat oleh pembuat pelaksana.

Selain yang telah disebutkan diatas, menurut doktrin dikenal pula beberapa bentuk pembantuan yang lain yakni :

1. Pembantuan aktif, ialah bentuk pembantuan dengan melakukan perbuatan aktif. Pembantuan aktif ini biasa disebut dengan perbuatan materiil (*materiele medeplichtige*).
2. Pembantuan pasif, ialah bentuk pembantuan dengan tidak melakukan perbuatan aktif, tetapi dengan tidak melakukan perbuatan aktif ini telah melanggar suatu kewajiban hukum. Jadi di sini harus melekat kewajiban hukum untuk berbuat.
3. Pembantuan intelektual, ialah bentuk pembantuan dengan memberikan saran dan petunjuk-petunjuk, atau nasihat yang berguna bagi orang lain yang telah berkehendak untuk melakukan kejahatan dalam melaksanakan kejahatan itu.

Undang-undang tidak membedakan antara bentuk pembantuan aktif atau pembantuan materiil, pembantuan pasif, maupun pembantuan intelektual. Ajaran-ajaran atau doktrin tentang bentuk-bentuk pembantuan tersebut oleh undang-undang kita telah dikerucutkan menjadi pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan dan pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

C. Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

Pemalsuan adalah suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Sedangkan surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia.²⁷ Maka Penulis berkesimpulan bahwa pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan meniru atau menciptakan suatu surat yang tidak asli lagi sehingga menyebabkan surat yang asli kehilangan keabsahannya.

Dasar hukum mengenai pemalsuan surat sendiri diatur dalam pasal 263 KUHP, yang berbunyi :

Pasal 263 :

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

²⁷ Ardi Ferdian dan Adami Chazawi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, hlm. 135.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2. Bentuk Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya, pemalsuan surat ayat (1) disebut dengan membuat surat palsu (*Valschelijk Opmaaken*) dan memalsu surat (*Versvalschen*). Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu.

1. Membuat Surat Palsu atau Memalsu Surat

Pasal 263 ayat (1) merumuskan sebagai berikut

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Untuk memenuhi rumusan tindak pidana yang dimaksud diatas, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan membuat palsu dan perbuatan memalsu, perbuatan membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada dimana isinya seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau

bertentangan dengan kebenaran (palsu). Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara apapun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat berbeda atau bertentangan dari surat semula atau surat aslinya.

- b. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, yang menimbulkan suatu perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat tersebut. Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isi suratnya, bukan pada bagian mana isi surat yang palsu atau dipalsu, atau bentuk suratnya.
- c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dalam unsur ini terkandung pengertian bahwa tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada (kerugian tersebut belum timbul secara nyata), baru kemungkinan akan adanya kerugian yang terjadi sudah memenuhi unsur ini. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat yang dipalsu tersebut digunakan. Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua orang, maksudnya

bila surat semacam itu digunakan maka dapat menimbulkan kerugian.

- d. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat yakni berupa kesengajaan sebagai maksud, atau kesengajaan dalam arti sempit. Dimana dengan maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat untuk dipakai olehnya sendiri atau dipakai oleh orang lain sudah dapat memenuhi unsur ini, sementara perbuatan memakai surat itu tidak perlu diwujudkan. Hal ini dikarenakan unsur maksud hanya ada dalam batin si pembuat, yang harus sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan.

2. Memakai Surat Palsu atau Surat yang Dipalsu

Pasal 263 ayat (2) merumuskan sebagai berikut

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Untuk memenuhi rumusan tindak pidana yang dimaksud diatas maka unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Memakai, artian memakai surat dalam ayat ini adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana maksud

dibuatnya surat itu. Memakai dirumuskan dalam bentuk yang abstrak, oleh karena itu wujud konkret dari memanfaatkan kegunaan surat (memakai surat) bisa bermacam-macam. Misalnya menyerahkan, memperlihatkan atau menunjukkan, mengirimkan, membacakan, menjual, menjadikan jaminan, dan lain sebagainya.²⁸ Berbeda halnya dengan ayat (1) pasal 263 dimana hanya dengan maksud atau niat yang ditujukan pada memakai sehingga dapat memenuhi rumusan tindak pidana pemalsuan surat. Maka dalam ayat (2) pasal 263 ini agar dapat memenuhi rumusan tindak pidana pemalsuan surat, wujud-wujud konkret perbuatan memakai surat seperti yang sudah disebutkan sebelumnya harus sudah terjadi atau selesai.

- b. Unsur surat palsu atau surat yang dipalsu, surat palsu adalah surat yang dihasilkan dari perbuatan membuat surat palsu, yang isinya sebagian atau seluruhnya palsu (sejak dilahirkan surat itu, sebagian atau seluruh isinya sudah palsu). Sedangkan surat yang dipalsu adalah surat yang dihasilkan dari perbuatan memalsu surat, yang isinya tidak sesuai atau berbeda dengan surat yang asli.
- c. Unsur seolah-olah asli, unsur seolah-olah asli ini menandakan bahwa surat yang digunakan itu bukanlah surat yang isinya benar.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 160.

Tidak benarnya bisa oleh sebab isinya palsu atau isinya dipalsu. Menurut **Moch. Anwar** unsur seolah-olah asli berarti bahwa pemakaian surat itu harus dilakukan sebagai sarana atau alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa saja dilakukan pemakaian surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.²⁹

Unsur-unsur diatas dikategorikan kedalam unsur objektif. Sedangkan unsur subjektif dalam ayat (2) pasal 263 KUHP adalah unsur dengan sengaja, dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah si pemakai mengendaki memakai surat yang isinya palsu atau dipalsu, si pemakai mengetahui bahwa surat itu sebagian atau seluruhnya isinya palsu atau dipalsu. Bahkan lebih khusus lagi, si pemakai juga harus mengerti bagian yang mana isi yang palsu atau dipalsu tersebut, si pemakai mengetahui atau menyadari bahwa dengan pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dan si pemakai itu sadar seperti menggunakan surat yang tidak dipalsu.

²⁹ Moch. Anwar. 1980. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II). Alumni: Bandung, hlm. 195.

D. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Kata pidana pada umumnya dapat diartikan sebagai hukum. Sedangkan kata pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman. Pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *straf* ada kalanya disebut dengan istilah hukuman, namun istilah pidana lebih tepat digunakan dari istilah hukuman karena istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.³⁰

Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Sedangkan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh **Sudarto** bersinonim dengan kata penghukuman, maka beliau mengutarakan bahwa penghukuman berasal dari kata hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni

³⁰ Andi Hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta : Jakarta, hlm. 27.

penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.³¹

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka yang menimbulkan penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana dimana pidana ini diberikan atau dijatuhkan melalui tahapan yang dikenal dengan pembedaan.

2. Teori-teori Pembedaan

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa pembedaan ditujukan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan hukum pidana. Maka muncullah beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pembedaan dan tujuan sebenarnya penjatuhan pidana, teori-teori tersebut antara lain :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan atau Teori Imbalan (*Vergeldings Theorien*).

Teori ini beranggapan bahwa hakikat pidana ialah pembalasan sehingga pidana merupakan tuntutan mutlak (absolut), bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. **Kant** sebagai penganut teori ini berpendapat pembalasan suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan kedalian, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan

³¹ P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. CV. Armico : Bandung, hlm. 49.

berencana, mutlak dilakukan. Sependapat dengan **Kant, Herbart** mengemukakan bahwa apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat tercapai atau dipulihkan maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tidak lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis (berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, dan lain sebagainya). Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Maka tindakan pembalasan dalam teori ini mempunyai dua arah di dalam penjatuhan pidana, yaitu ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan), dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam korban maupun kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik hati korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Berdasarkan teori ini, pidana dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari pidana itu, yakni untuk menegakkan tata tertib

(hukum) dalam masyarakat dan mencegah (prevensi) kejahatan.

Namun terdapat perbedaan dalam hal prevensi, yakni :

1. Prevensi umum, dimana pemidanaan dilakukan untuk mempengaruhi tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana;
2. Prevensi khusus, dimana pencegahan kejahatan melalui pemidanaan bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

Apabila teori absolut berpandangan bahwa pemidanaan dilakukan sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan, maka teori relatif berpandangan bahwa pemidanaan dilakukan untuk mendidik masyarakat secara umum agar tidak melakukan tindak pidana serta mendidik terpidana secara khusus agar tidak melakukan tindak pidana lagi, dan menjadi pribadi yang lebih baik sehingga tata tertib (hukum) tetap terpelihara.

3. Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*)

Pada dasarnya, teori gabungan adalah perpaduan kedua teori sebelumnya. dalam teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.³²

Oleh sebab itu menurut teori ini penjatuhan pidana adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

3. Jenis-jenis Pidana

Berdasarkan pasal 10 KUHP maka jenis-jenis pidana dibedakan atas :

- a. Pidana Pokok :
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan lain.

³² Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, hlm. 166.

E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan yang menjadi dasar dalam memvonis atau memutus suatu perkara. Pertimbangan hukum atau pertimbangan yuridis sendiri adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan seperti dakwaan jaksa/penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Setelah fakta-fakta persidangan diungkapkan, selanjutnya hakim mempertimbangkan unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum/*dictum* putusan hakim. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Setelah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dalam praktek putusan hakim, maka di dalam pertimbangan yuridis ini juga hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal-hal yang meringankan seperti yang diatur dalam perundang-undangan antara lain karena usia belum dewasa, percobaan dan pembantuan melakukan kejahatan. Sedangkan hal-hal yang memberatkan antara lain pemberatan pidana karena jabatan, pemberatan pidana karena menggunakan sarana bendera kebangsaan, pengulangan tindak pidana, karena perbarengan (*concursum*), serta terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*).

Selain pertimbangan yuridis, dalam memvonis atau memutus suatu perkara, hakim juga menggunakan pertimbangan sosiologis yakni pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Adapun hal-hal yang dipertimbangkan dalam pertimbangan sosiologis antara lain kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin membuat tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, sikap dan perbuatan pelaku setelah melakukan perbuatan pidana, pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, korban atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis, hingga psikologis juga perlu dimiliki oleh seorang hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan Penulis dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka Penulis melakukan penelitian dengan memilih kota Makassar sebagai lokasi penelitian. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di tempat yang dianggap memiliki data dan informasi sesuai dengan objek yang diteliti yaitu pada Pengadilan Negeri Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang dibutuhkan adalah :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait guna mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait dengan penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, majalah-

majalah serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan terkait skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yakni penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan metode interview atau wawancara terhadap narasumber guna mendapatkan data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Yakni penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan melakukan studi kepustakaan seperti mempelajari buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah, serta sumber bacaan lainnya guna mendapatkan data yang akurat yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

D. Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, selanjutnya Penulis akan menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yakni dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis.

Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan gambaran secara jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam perkara putusan nomor 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS.

1. Posisi Kasus

Sekitar bulan Mei s/d Juni 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Maccini Kel. Makassar, Kota Makassar, telah terjadi kasus pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK yang dilakukan oleh RAHMAN alias Suneo Bin NASRUL dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan pihak Samsat dan Kantor Dispenda setempat mengalami kerugian dan juga berdampak kepada kerugian Negara.

Bahwa berawal pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Israfil dimana saat itu Sdr. Israfil meminta terdakwa agar membawa STNK ke Sdr. Syahril.

Bahwa STNK yang terdakwa bawa kepada Sdr. Syahril tersebut terdakwa ketahui kalau isi dari STNK tersebut sudah tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang telah dirubah oleh Sdr. Israfil dimana oleh Sdr. Israfil dijual kepada Sdr. Syahril dan untuk pengantaran tersebut terdakwa

mendapatkan bagian/upah sebesar Rp. 100.000,- per lembar dan terdakwa telah mengantar STNK palsu sebanyak 6 lembar.

Bahwa sebelumnya terdakwa ketahui kalau yang berwenang menerbitkan/mengeluarkan STNK adalah pihak Kantor Samsat dan Kantor Dispenda setempat namun terdakwa tetap saja mau mengantarkan STNK dimaksud karena terdakwa mendapatkan upah dari penjualan tersebut.

Bahwa adapun perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Samsat dan kantor Dispenda setempat mengalami kerugian dan juga dapat berdampak kepada kerugian Negara.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar penting dalam beracara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan tersebut, hakim akan memeriksa perkara itu.

Menurut **A. Karim Nasution** dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.³³

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa syarat formil surat dakwaan meliputi :

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan

³³ Irdan Dahlan dan A. Hamzah. 1987. *Surat Dakwaan (Suatu Kumpulan Praktis Berdasar Teori)*. Alumni : Bandung, hlm. 17.

- b. Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;

Sementara syarat materiil suatu dakwaan antara lain :

- a. Tindak pidana yang dilakukan;
- b. Siapa yang melakukan tindak pidana;
- c. Dimana tindak pidana dilakukan
- d. Kapan tindak pidana dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana dilakukan;
- f. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
- g. Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- h. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Adapun dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RAHMAN Alias SUNE0, pada sekitar bulan Mei s/d bulan Juni 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Dg. Ramang Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, ***menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte otentik itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.***

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. Israfil dimana saat itu terdakwa diberi STNK palsu untuk diantarkan kepada Sdr. Syahril.
- Bahwa saat itu terdakwa telah mengetahui kalau STNK yang akan diantar tersebut adalah STNK palsu dimana data-data yang ada dalam STNK dimaksud tidak sesuai dengan sebenarnya.
- Bahwa STNK palsu tersebut terdakwa antar kepada Sdr. Syahril untuk diberikan kepada orang lain yang memesan untuk digunakan.
- Bahwa untuk pengantaran tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- per lembarnya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui kalau yang berhak mengeluarkan STNK adalah pihak Samsat dan Dispenda Pemkon Makassar.
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Samsat dan Kantor Dispenda setempat mengalami kerugian dan juga berdampak kepada kerugian Negara.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

**ATAU,
KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa RAHMAN Alias SUNEI BIN NASRUL bersama-sama dengan Sdr. Israfil (diajikan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan Januari 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jl. Maccini Kel. Makassar Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan/memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar, dimana pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.***

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Israfil dimana saat itu Sdr. Israfil meminta terdakwa agar membawa STNK ke Sdr. Syahril.

- Bahwa STNK yang terdakwa bawa kepada Sdr. Syahril tersebut terdakwa ketahui kalau isi dari STNK tersebut sudah tidak sesuai dengan yang sebenarnya.yang telah dirubah oleh Sdr. Israfil dimana oleh Sdr. Israfil dijual kepada Sdr. Syahril dan untuk pengantaran tersebut terdakwa mendapatkan bagian/upah sebesar Rp. 100.000,- per lembar dan terdakwa telah mengantar STNK palsu sebanyak 6 lembar.
- Bahwa sebelumnya terdakwa ketahui kalau yang berwenang menerbitkan/mengeluarkan STNK adalah pihak Kantor Samsat dan Kantor Dispenda setempat namun terdakwa tetap saja mau mengantarkan STNK dimaksud karena terdakwa mendapatkan upah dari penjualan tersebut.
- Bahwa adapun perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Samsat dan Kantor Dispenda setempat mengalami kerugian dan juga dapat berdampak kepada kerugian Negara.-

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

**ATAU,
KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa RAHMAN Alias SUNEEO Bin NASRUL, pada sekitar bulan Januari 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Tahun 2016, bertempat di Jl. Maccini Kel. Makassar Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN. Makassar, ***dengan sengaja menggunakan/memakai surat yang isinya tidak benat atau dipalsukan seolah-olah benar, dimana pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.***

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Israfil dimana saat itu Sdr. Israfil meminta terdakwa agar membawa STNK ke Sdr. Syahril.
- Bahwa STNK yang terdakwa bawa kepada Sdr. Syahril tersebut terdakwa ketahui kalau isi dari STNK tersebut sudah tidak sesuai dengan yang sebenarnya.yang telah dirubah oleh Sdr. Israfil dimana oleh Sdr. Israfil dijual kepada Sdr. Syahril dan untuk pengantaran tersebut terdakwa mendapatkan bagian/upah sebesar Rp. 100.000,- per lembar dan terdakwa telah mengantar STNK palsu sebanyak 6 lembar.
- Bahwa sebelumnya terdakwa ketahui kalau yang berwenang menerbitkan/mengeluarkan STNK adalah pihak Kantor Samsat

dan Kantor Dispenda setempat namun terdakwa tetap saja mau mengantarkan STNK dimaksud karena terdakwa mendapatkan upah dari penjualan tersebut.

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Samsat Kantor Dispenda setempat mengalami kerugian dan juga dapat berdampak kepada kerugian Negara.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan sebelumnya, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pembantuan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN Alias SUNEEO BIN NASRUL memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN Alias SUNEEO, bersalah melakukan bantuan saat Tindak Pidana pemalsuan STNK dilakukan, sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN Alias Suneo, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.-
4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN ALIAS SUNEO BIN NASRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Pemalsuan Surat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah).

5. Analis Penulis

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan dakwaan alternatif, dimana dakwaan disusun secara berlapis. Bentuk dakwaan ini digunakan apabila belum didapat kepastian mengenai tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan, dalam dakwaan alternatif meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Adapun dakwaan alternatif yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada terdakwa antara lain : **Kesatu : didakwa dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP; atau Kedua : didakwa dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo**

Pasal 55 ayat (1) KUHP; atau Ketiga : didakwa dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Penuntut Umum dalam tuntutan. Di dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP yaitu pembantuan pemalsuan surat. Hingga tiba pada pengambilan keputusan dalam persidangan perkara ini, setelah melalui berbagai macam pertimbangan, akhirnya Majelis Hakim memutuskan mengabulkan tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan pembantuan pemalsuan STNK, sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan pembantuan pemalsuan STNK, sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, maka semua unsur-unsur mengenai tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

2. Dengan sengaja menggunakan/memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar, dimana pemakaian surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar, dan dapat menimbulkan kerugian.

3. Dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan.

Yang mana selanjutnya akan Penulis uraikan unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

1. Unsur Barangsiapa

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum, yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam perkara ini terdakwa telah mengakui dan menyebutkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yakni terdakwa RAHMAN Alias SUNEEO Bin NASRUL. Berdasarkan hal tersebut maka unsur barangsiapa telah terbukti.

2. Unsur dengan sengaja menggunakan/memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar, dimana pemakaian surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar, dan dapat menimbulkan kerugian.

Di dalam unsur ini yang dimaksud dengan sengaja menggunakan/memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar yakni orang yang mengetahui bahwa surat yang digunakannya itu palsu atau telah dipalsu namun tetap menggunakan atau memakai surat tersebut seolah-olah benar atau asli. Mengingat pengertian kata menggunakan atau memakai yang abstrak sehingga wujud konkret dari memanfaatkan kegunaan surat (menggunakan/memakai surat) bisa bermacam-macam, maka undang-undang dalam hal ini KUHP menjelaskan bahwa perbuatan menyerahkan atau mengantarkan surat kepada orang lain atau di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan sudah dianggap sebagai perbuatan menggunakan/memakai. Sedangkan yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan suatu kerugian” tidak berarti harus ada kerugian secara nyata. Adanya peluang akan timbul kerugian dikemudian hari dapat dikategorikan dalam unsur “dapat menimbulkan suatu kerugian”. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, menjelaskan bahwa terdakwa telah dimintai tolong oleh Sdr. Israfil untuk menyerahkan STNK palsu kepada Sdr. Syahril dan selanjutnya oleh Sdr. Syahril menyerahkan kepada Sdr. Sul untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, dimana penggunaan atau pemakaian surat/STNK palsu tersebut dapat merugikan

masyarakat serta pihak Dispenda dan Samsat setempat. Berdasarkan hal tersebut maka unsur dengan sengaja menggunakan/memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar, dimana pemakaian surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar, dan dapat menimbulkan kerugian telah terbukti.

3. Unsur dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan.

Yang dimaksud dengan sengaja di dalam unsur ini bahwa orang yang memberikan bantuan atau dalam hal ini disebut pembuat pembantu sadar atau insyaf bahwa perbuatannya dalam memberikan bantuan itu adalah untuk kepentingan orang yang dibantunya, dengan kata lain perbuatan membantu dalam unsur ini ditujukan perihal untuk mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (orang yang diberikan bantuan) dalam melaksanakan kejahatan, sehingga orang yang memberikan bantuan tersebut tidak punya kepentingan utuh dan penuh atau memiliki kepentingan lain atau bahkan tidak memiliki kepentingan sama sekali terhadap terwujudnya tindak pidana. Hal ini dikarenakan orang yang mempunyai kepentingan utuh dan penuh terhadap terwujudnya tindak pidana yang dituju ada pada diri orang yang dibantu atau dalam hal ini disebut sebagai pembuat pelaksana. Sesuai fakta-

fakta yang terungkap dimuka persidangan, menjelaskan bahwa terdakwa telah memberikan bantuan kepada Sdr. Israfil untuk mengantarkan STNK palsu yang data-datanya telah dirubah oleh Sdr. Jumain atas permintaan Sdr. Israfil kepada Sdr. Syahril, dimana terdakwa tertarik dengan iming-imingan upah sebesar Rp. 50.000,- sehingga bersedia membantu mengantarkan surat/STNK palsu tersebut. Apabila dihubungkan dengan unsur dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan, maka terdapat kesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terbukti.

Oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti seluruhnya, maka keputusan Majelis Hakim menerapkan Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa menurut Penulis sudah tepat.

Selanjutnya dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang terdakwa haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHP, yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Adapun alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dimuka persidangan dalam perkara ini antara lain keterangan saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa itu sendiri, semakin membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga sangat tepat dan beralasan kuat bagi Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam putusan nomor 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS.

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata, dimana persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan sebagai sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa keadilan itu bersifat abstrak,

tergantung dari sudut pandangnya. Oleh karena itu edalam rangka memaksimalkan tujuan hukum, maka hukum tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Berikut akan Penulis uraikan mengenai perimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini :

Menimbang, bahwa ia terdakwa **RAHMAN ALIAS SUNE0 BIN NASRUL** telah diperhadapkan ke persidangan dengan dakwaan Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah yakni 1. Slamet Riady S. 2. Hakim S.E. 3. H. Tamba Hamid S.Sos. 4. Israfil Alias Cikal Bin Ismail Dg. Ewa sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang selengkapnya termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian didukung pula oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membantu Pemalsuan Surat”**;

Menimbang, bahwa dakwaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut serta terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka ia terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan masyarakat, pihak Kantor Samsat dan Kantor Dispenda setempat.

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini.

2. Analisis Penulis

Putusan akhir atau vonis merupakan suatu tahapan akhir dalam suatu proses peradilan, dimana dalam tahapan ini menentukan terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Pasal 1 ayat (11) KUHP menyatakan bahwa putusan pengadilan atau putusan adalah pernyataan yang diucapkan dalam sidang peradilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Di dalam putusan akhir yang menyatakan terdakwa bersalah atas suatu tindak pidana dibarengi pula dengan penjatuhan pidana terhadapnya, dimana dalam penjatuhan pidana tersebut Majelis Hakim memiliki banyak pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis yang terdiri atas dakwaan

Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan juga tetap memperhatikan undang-undang terkait serta pertimbangan sosiologis yakni pertimbangan yang menitik beratkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Dalam putusan Nomor 1745/Pid. Sus/2016/PN. MKS, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang mana dalam pertimbangannya menilai dan menerapkan Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP untuk memidana terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum menurut Penulis sudah tepat. Dari segi pertimbangan yuridis di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan telah terbukti. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yakni Bapak Bonar Harianja, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua yang mengadili perkara ini mengatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim menerapkan Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP disebabkan karena fakta-fakta yang saling mendukung antara fakta yang satu dengan fakta lainnya yang terungkap di muka persidangan, dimana fakta-fakta yang terungkap tersebut antara lain keterangan para saksi yang pada kesimpulannya membenarkan bahwa terdakwa memberikan

bantuan berupa mengantarkan surat atau STNK palsu kepada saksi Sdr. Israfil yang sebelumnya telah meminta tolong kepada terdakwa, dimana terdakwa di ditawari upah sebesar Rp. 50.000,- untuk setiap pengantaran. Dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini pihak Samsat dan Kantor Dispenda setempat dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa benar ia memberikan bantuan berupa mengantarkan surat atau STNK palsu atas permintaan saksi Sdr. Israfil dimana atas pengantaran tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 50.000,- setiap kali mengantar. Lalu hal yang membuat Majelis Hakim yakin bahwa perbuatan terdakwa termasuk sebagai pembantuan sehingga mengesampingkan dakwaan-dakwaan lainnya menurut Bapak Bonar Harianja karena adanya keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa membantu saksi Sdr. Israfil karena tertarik pada tawaran upah pengantaran sebesar Rp. 50.000,- yang ditawarkan oleh saksi Sdr. Israfil, dan tidak memiliki niat atau tujuan sama sekali terhadap terwujudnya tindak pidana pemalsuan surat itu sendiri.

Dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim di dalam pertimbangannya selain menggunakan pertimbangan dari segi yuridis juga menggunakan pertimbangan dari segi sosiologis dimana menurut Majelis Hakim hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan terdakwa

tersebut dapat merugikan masyarakat, pihak Kantor Samsat, dan Kantor Dispenda setempat, serta hal yang meringankan terdakwa yakni terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya. Serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 57 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal pemidaan terhadap hal pembantuan, maksimum pidana pokok yang dijatuhkan terhadap suatu tindak pidana, dikurangi sepertiga terhadap pelaku pembantuan. Maka dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Berdasarkan hal-hal tersebut berkenaan dengan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa menurut Penulis sudah tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan Nomor : 1745/Pid.Sus/2016/PN.MKS sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dimana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan dakwaan alternatif yakni Kesatu : didakwa dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP; atau Kedua : didakwa dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; atau Ketiga : didakwa dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, dan dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil suatu dakwaan. Lalu dalam tahap penuntutan, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah telah melakukan pembantuan pemalsuan surat sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka

persidangan baik itu keterangan saksi, keterangan terdakwa, hingga petunjuk-petunjuk yang ada, maka penerapan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP terhadap perkara ini telah sesuai. Dan karena terdakwa terbukti cakap menurut hukum, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara ini telah sesuai, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan seperti keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, petunjuk-petunjuk, yang mana kesemuanya itu menunjukkan kaitan atau relevansi yang kuat antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. serta pertimbangan-pertimbangan sosiologis yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga membentuk keyakinan Hakim di dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut untuk menyatakan terdakwa bersalah atas Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan Penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebelumnya Penulis ingin menyampaikan bahwa Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menjalankan

tugasnya sebagaimana mestinya, maka penulis ingin mengingatkan kembali agar kedepannya tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.

2. Kepada pihak Kejaksaan dan Kehakiman kiranya dalam menyusun dakwaan dan membuat putusan agar lebih cermat, jelas, dan lengkap lagi karena apabila tidak, akan berakibat fatal dan batal demi hukum.
3. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan tidak memberikan kesempatan kepada oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan lewat pembuatan STNK palsu, karena selain merugikan diri sendiri juga merugikan Negara dalam hal ini kantor Samsat dan Dispenda.
4. Masyarakat diharapkan dalam hal mengurus surat-surat terkait dengan kendaraan bermotor agar mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ada yakni dengan mengurusnya di kantor Samsat, hal ini tidak lain bertujuan untuk mengurangi bahkan menutup mata pencaharian oknum-oknum tidak bertanggungjawab pelaku pembuat STNK palsu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Z. Abidin dan A. Hamzah. 2006. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. PT RajaGrafindo : Jakarta;
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta;
- . 2011. *Pelajaran Hukum Pidana : Percobaan dan Penyertaan*. 2011. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta;
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta : Jakarta;
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta;
- Ardi Ferdian dan Adami Chazawi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta;
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidada Indonesia : Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama : Bandung;
- Irdan Dahlan dan A. Hamzah. 1987. *Surat Dakwaan (Suatu Kupasan Praktis Berdasar Teori)*. Alumni : Bandung;
- Laden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta;
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta : Jakarta;

Moch. Anwar. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*. Alumni: Bandung;

P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. CV. Armico : Bandung;

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana : Jakarta;

R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea : Bogor;

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta;

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Aditama: Bandung.

Yulies Tiena Masriani. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta;

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana